

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fakta yang terjadi hingga saat ini bahwa tempat ibadah hanya dijadikan sebagai tempat untuk melakukan atau melayani aktivitas ritual peribadatan, seperti sholat, berdoa, berdzikir dan lain sebagainya. Namun, sebenarnya tempat ibadah apabila disadari sebagai salah satu bentuk organisasi memiliki peranan yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan tidak kalah strategisnya dengan jenis organisasi publik lainnya.

Organisasi pada lembaga peribadatan dapat dikategorikan ke dalam organisasi nirlaba (Bastian, 2007:216). Perbedaan sifat karakteristik organisasi keagamaan yang tergolong ke dalam organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya yang *profit-oriented* dapat dilihat dengan membandingkan sumber pendanaan, pola pertanggung jawaban, struktur keorganisasian, anggarannya, serta tujuan dari Masjid itu sendiri.

Organisasi keagamaan merupakan organisasi nirlaba yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 “Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Organisasi nirlaba memperoleh sumber dana dari para anggota dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tertentu”.

Masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam organisasi nirlaba (non profit oriented) dalam menjalankan aktivitasnya, dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya dan sumber daya yang diperoleh

dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas. Menurut Dewan Masjid Indonesia (DMI) terdapat tiga fungsi masjid. Pertama, masjid sebagai ibadah (madlah) juga merupakan tempat ibadah secara luas (ghairu madhlah) selama dilakukan dalam batas-batas syariah. Kedua, masjid sebagai wadah pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masjid yang bersangkutan dan ketiga masjid sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat. Berdasarkan hasil kajian Puslitbang kehidupan beragama, bahwa hanya terdapat beberapa masjid saja yang mampu memenuhi ke tiga fungsi tersebut. Banyak masjid yang belum bisa mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat dengan kualitas yang baik dan benar. Padahal ini merupakan hal yang sangat penting, karena masyarakat juga ingin mengetahui apakah sumber dana yang diberikan pada masjid di salurkan dengan benar.

Masjid Agung Islamic Centre merupakan masjid termegah dan terbesar di Kabupaten Rokan Hulu dan menjadi ikon Negeri Seribu Suluk. Masjid ini mendapatkan penghargaan sebagai Masjid terbaik di Indonesia Tahun 2015. Dengan demikian daya tampung pada masjid ini sangat memadai untuk menampung bahkan sampai puluhan ribu jamaah dan aktif sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang baik, terutama pengelolaan keuangannya. Selain itu masjid yang berada pada naungan Pemerintahan Kabupaten ini terdiri dari tiga lantai yang mencakup ruangan ibadah, kantor sekretariat, aula, perpustakaan, berdagang, dan menara yang dijadikan sebagai wisata. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang paling sering dimanfaatkan sebagai lokasi tabligh akbar dan *event-event* keislaman yang besar, serta adanya aula masjid yang berada di

lantai dasar yang bisa digunakan selain acara peribadatan seperti digunakan untuk kegiatan wisuda sarjana.

Salah satu yang menjadi perhatian dalam masjid adalah masalah keuangannya, apalagi untuk masjid yang berukuran besar dan di dalamnya terdapat beberapa aktifitas. Adapun aktifitas yang penulis maksud disini yaitu berupa kegiatan pengembangan masyarakat salah satunya melalui pendidikan keagamaan seperti tahfidz qur'an. Sebagai masjid yang dikenal megah dan ikonnya kabupaten tentu arus penerimaan dan pengeluaran kas akan sangat lancar baik itu dari segi penerimaannya yang terbilang sangat besar untuk ukuran masjid atau tempat ibadah dimana kas atau saldo masjid mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Dengan jumlah saldo yang besar ini menuntut pengurus masjid untuk menyalurkan dan mengelola dananya dengan baik.

Sumber dana Masjid Agung Islamic Centre berasal dari publik, yaitu jamaah Masjid tersebut dan lainnya. Sumber dana berupa tabungan harian Masjid, sumbangan Jamaah Jumat, sumbangan akad nikah, dan lain-lain. Dari sumber dana yang banyak tersebut, maka aliran keuangan atau kas masuk masjid akan sangat banyak sehingga perlu dilakukan pengelolaan yakni pencatatan keuangan. Pada umumnya, masjid hanya menyajikan laporan keuangan yang sederhana seperti laporan infak/kotak amal keliling yang biasanya dilaporkan seminggu sekali. Pengurus masjid yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya tentunya tidak akan melalaikan tugasnya, apalagi jika diingat bahwa keuangan masjid diperoleh dari sedekah jamaah. Tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan rinci,

otomatis nama baik pengurus atau pengelola akan tercemar dan akan menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat.

Sebagai entitas pelaporan akuntansi yang menggunakan dana masyarakat (publik) sebagai sumber keuangannya dalam berbagai bentuk, masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik, transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan maksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada dan berbeda dengan entitas publik lainnya (simanjuntak : 2011).

Mardiasmo (2009:20) mengungkapkan bahwa “akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Dan National *Committee of Governance* (2006) menyatakan bahwa “transparansi berarti kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan”.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “**Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Pada Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan tersebut, penulis dapat menguraikan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu ?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah menganalisa dan mengetahui :

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu
2. Transparansi pengelolaan keuangan Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak berkepentingan antara lain:

1. Bagi Masjid

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan atau pegangan bagi pengelola masjid dalam melakukan pencatatan atas transaksi baik itu pemasukan maupun pengeluaran masjidnya sehingga arus keluar masuk kas lebih jelas penggunaannya mengingat masjid sebagai salah satu bentuk organisasi (non-profit oriented) yang digunakan sebagai sarana ibadah dan

digunakan untuk segala hal yang berhubungan dengan kegiatan umat. Untuk itu masjid memerlukan sistem pelaporan keuangan yang efektif serta segala bentuk informasi yang dapat mendukung sarana peribadatan, kegiatan keagamaan, termasuk aktivitas perawatan dan pemeliharaan masjid. Melihat pentingnya fungsi keuangan dalam suatu lembaga, akan sangat baik jika kegiatan pengelolaan keuangan diatur dengan menggunakan manajemen yang tepat (Syaifuddin, 2016).

2. Bagi Penulis

Penelitian ini juga diharapkan menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan serta meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid.

3. Bagi Peneliti Lain

Berguna sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid” dengan objek penelitiannya adalah Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu.

1.6 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan Khairaturrahmi dan Ridwan Ibrahim dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Maasjid di Kota Banda Aceh” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Tahun 2018. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitian yang dilakukan di Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan penelitian relevan yang menjadi referensi penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini hasil penelitian dijelaskan secara ringkas melalui kesimpulan dan mengemukakan saran-saran untuk pengembangan hasil penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Masjid

Halim dan Kusufi (2014:457) menyatakan “Dalam konteks organisasi peribadatan, manajemen keuangan organisasi peribadatan adalah usaha yang dilakukan pengelola tempat peribadatan dalam menggunakan dana umat sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama dan kepentingan umat beragama, serta bagaimana memperoleh dana dari umat dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama)”. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan pencatatan sumber penerimaan kas, pengeluaran serta pertanggungjawaban penggunaan sumber penerimaan dalam hal ini sumber penerimaan masjid.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam manajemen keuangan terdapat dua fungsi :

- 1) Fungsi mendapatkan dana
- 2) Fungsi menggunakan dana

Sumber-sumber penerimaan masjid berasal dari sumbangan dari masyarakat dan jamaah dalam bentuk infaq dan sedekah yang diperoleh kebanyakan pada saat pelaksanaan shalat jumat. Penerimaan masjid yang bersumber dari penerimaan-penerimaan berupa sumbangan dari masyarakat dan jamaah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran masjid baik untuk pengeluaran rutin maupun yang tidak rutin. Pengeluaran rutin berupa

pembayaran biaya listrik, PDAM, gaji karyawan dan untuk biaya pemeliharaan bangunan dan fasilitas masjid. Pengeluaran yang dilakukan oleh pengurus masjid tersebut sebagai bentuk akuntabilitas terhadap jamaah karena pengeluaran tersebut untuk digunakan untuk kepentingan jamaah sebagai bentuk pelayanan masjid dan pertanggungjawabannya terhadap masyarakat dan jamaah masjid.

Selain pengelolaan penerimaan dan penggunaan kas, pengurus masjid perlu melakukan pencatatan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada jamaah yang secara tidak langsung memberikan amanah kepada pengurus untuk mengelola dana tersebut dengan baik. Dalam organisasi masjid, pengelolaan keuangan dan administrasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola masjid. Jika pengelolaan keuangan masjid dapat dilaksanakan dengan baik, itu pertanda pengurus masjid orang yang dapat bertanggung jawab dan dipercaya. Akan tetapi, jika pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan tidak baik, maka akan berakibat timbulnya fitnah dan pengurusnya akan dinilai sebagai orang yang tidak dapat dipercaya dan bertanggungjawab (Septiany, 2015).

2.1.2 Good Corporate Governance (GCG)

Corporate Governace menurut Sutedi (2012) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholders. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yang pertama pentingnya hak para stakeholder untuk memperoleh informasi dengan

benar dan tepat pada waktunya dan yang kedua adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap kinerjanya.

Beberapa prinsip dasar Good Corporate Governance yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik :

- 1) Fairness (kewajaran)
- 2) Transparency (Transparansi)
- 3) Accountability (akuntabilitas)
- 4) Responsibility (responsibilitas)

2.1.3 Akuntabilitas

Mardiasmo (2009:20) mengungkapkan bahwa “akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban penerima tanggung jawab untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada

otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan (Sochimim, 2015).

Praktik akuntansi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas di entitas keagamaan khususnya Islam melalui masjid masih jarang menjadi perhatian khusus dalam praktik dan kajian ilmiah. Padahal dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas organisasi dalam hal ini ruang publik masjid, perlu untuk melakukan pembenahan administrasi termasuk publikasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan.

Pertanggungjawaban mengarah pada semua pengurus kerana bagaimanapun mereka adalah satu kesatuan organisasi yang harus bekerja sama dalam menjalankan semua kegiatan termasuk di dalamnya yaitu pengelolaan keuangan masjid. Namun, bendahara tetap memiliki tugas yang lebih dalam pengelolaan tersebut dan harus memberikan laporan keuangan kepada pengurus lain yang kemudian akan disampaikan dihadapan jama'ah setelah sholat jum'at dilaksanakan dan juga ditempel pada papan pengumuman masjid (Latif, 2014). Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.4 Transparansi

National Committee of Governance (2006) menyatakan bahwa "transparansi berarti kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan".

Menurut UNDP (*United Nation Development Program*) "transparansi adalah tersedianya informasi secara bebas dan dapat diakses secara langsung kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh suatu pelaksanaan keputusan. Kemudian informasi disediakan dengan isi yang mudah dipahami".

Prinsip pokok pelaksanaan transparansi :

- 1) Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut (Sutedjo, 2009)
- 2) Informasi harus diungkapkan secara lengkap, antara lain visi, misi, susunan pengurus, bentuk perencanaan, dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donatur. Pengungkapan informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur, dan mutakhir.
- 3) Adanya media untuk menyampaikan pendapat, saran, kritik maupun argumen terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah (Sutedjo : 2009)

2.1.5 Laporan Keuangan Nirlaba (PSAK No. 45)

Organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi yang berorientasi kepada laba dalam menjalankan kegiatannya, organisasi nirlaba tidak semata-mata digerakkan oleh tujuan untuk mencari laba. Meski demikian *not-for-profit* juga harus diartikan sebagai *not-for-loss*. Oleh karena itu, organisasi nirlaba selayaknya pun tidak mengalami defisit. Adapun bila organisasi nirlaba memperoleh surplus maka surplus tersebut akan dikembalikan kembali untuk pemenuhan kepentingan publik. Banyaknya kasus bahwa pengelola masjid tidak amanah dalam pengelolaan keuangan, untuk itu organisasi nirlaba perlu menyusun laporan keuangan. Hal ini bagi sebagian organisasi nirlaba yang lingkungannya masih kecil serta sumber dayanya masih belum memadai, mungkin akan menjadi hal yang menantang untuk dilakukan. Terlebih karena organisasi nirlaba jenis ini umumnya lebih fokus pada pelaksanaan program ketimbang mengurus administrasi. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan karena organisasi nirlaba tidak boleh hanya mengandalkan pada kepercayaan yang diberikan para donaturnya (Fatih, 2015).

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba (Mangkona, 2015). Permasalahan lain yang seringkali muncul yaitu masih banyaknya masjid yang tidak mencatat secara rinci pemasukan dan pengeluaran kas, biasanya hanya dicatat sebatas

penerimaan dan pengeluaran kas tanpa merinci sumber pemasukan kas dan penggunaan kas masjid untuk apa saja, sehingga terkadang hal ini menimbulkan kecurigaan dikalangan masyarakat. Pencatatan keuangan masjid biasanya hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran kas masjid saja tanpa memperlihatkan jumlah asset yang dimiliki oleh masjid dan berapa nilainya, sehingga banyak kasus hilangnya asset masjid karena kelemahan sistem pencatatan laporan keuangan (Andarsari, 2016). Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2008 membuat pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK No. 45) untuk organisasi nirlaba sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan agar laporan keuangan yang disajikan mudah dipahami oleh pengguna. Oleh karena itu, Masjid yang merupakan organisasi nirlaba diharapkan menyajikan laporan keuangannya dengan berpedoman pada PSAK No 45. Karakteristik organisasi nirlaba atau dalam hal ini, organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi sektor publik memperoleh sumber daya dari lembaga donatur dan para penyumbang lainnya. Pengawasan pengelolaan masjid dilakukan oleh takmir masjid. Takmir masjid mengelola masjid menyediakan informasi yang dibutuhkan seperti dalam hal fasilitas masjid yaitu peralatan yang dibutuhkan masjid secara rutin, aktivitas apa saja yang harus dilaksanakan, serta bagaimana mengalokasikan sumber daya masjid untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dalam penerapan akuntansi masjid, masjid menggunakan

basis kas yaitu mengakui biaya dan pendapatan pada saat pembayaran, dan masjid tidak perlu membuat jurnal cukup dengan pembukuan yang dicatat dengan tunggal (*single entry method*).

Menurut PSAK No. 45, organisasi nirlaba perlu setidaknya 4 jenis laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan.

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

2. Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan.

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

3. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan.

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

4. Catatan atas laporan keuangan.

Merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak terpisahkan karena berisikan penjelasan-penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian sebelumnya dengan topik yang hampir sama, diantaranya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Tedahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
Khairaturrahmi, Ridwan Ibrahim (2018)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Banda Aceh	1. Pengumpulan data 2. Reduksi data 3. Display data 4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan	1. Masjid di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya, walaupun tidak memiliki SOP tertulis, namun dalam pelaksanaan kegiatan, pengurus mengikuti aturan-aturan yang sudah menjadi tradisi dalam kepengurusan Masjid. 2. Pengelolaan keuangan Masjid sudah transparan dengan dapat diaksesnya laporan keuangan Masjid oleh Jamaah melalui publikasi dan media yang dilakukan dan disediakan oleh pengurus, pengurus juga menerima saran dan kritik dari jamaah.
Edy Suprianto (2018)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid Di Semarang	1. Tahap persiapan penelitian 2. Pertanyaan <i>indeepth interview</i>	Pengelolaan keuangan dan akuntabilitas publik sudah dijalankan oleh Takmir Masjid di kota Semarang. Sistem tata kelola masjid meskipun masih sederhana, namun tata kelola sangat syari'ah dengan mengedepankan kejujuran dan amanah.
Rini Rini (2018)	Pengelolaan Keuangan Masjid di Jabodetabek		Pengurus masjid berpendapat masjid sudah mempunyai laporan keuangan. Namun hanya sebagian kecil masjid yang mempunyai laporan keuangan sesuai PSAK. Jenis laporan keuangan yang dibuat sebagian besar hanya laporan kas. Publikasi laporan keuangan kepada jamaah, mayoritas

			dengan cara mengumumkan pada saat sholat Jum'at dan ditempel pada papan pengumuman. Rekening yang dimiliki masjid sebagian besar atas nama pengurus. Penerimaan masjid terutama berasal dari infak dan wakaf jamaah. Hanya sebagian kecil masjid yang sudah diaudit laporan keuangannya.
--	--	--	--

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih objek penelitian yaitu Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu dipilih karena merupakan masjid tersebut yang menjadi pusat pengembangan ibadah agama Islam terbesar dan termegah di Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan pada masjid ini bukan hanya digunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah saja namun banyak kegiatan kegiatan besar lainnya sehingga aktivitas di masjid ini tergolong aktif. Selain itu, lokasi masjid terletak di tengah-tengah kota Pasir Pengaraian sehingga mudah untuk di akses.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Adapun pengertian dari penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2017:35) Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak membuat

perbandingan variabel itu pada sampel lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain.”

Metode deskriptif menurut penjelasan Anwar Sanusi (2014:13) merupakan desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Anwar Sanusi (2014:13) juga menambahkan bahwa “penelitian deskriptif berfokus kepada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan”.

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif akan digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif, yaitu informasi yang diperoleh dari informan berupa hasil wawancara, dengan demikian data adalah kalimat yang merupakan pendapat informan. Penelitian ini memandang representasi informan terwakili oleh kualitas informasi yang diberikan oleh informan yang dilibatkan pada penelitian ini. Para informan, mereka tidak hanya sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi juga telah menghayati atau memahami dengan sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan dan kegiatan yang bersangkutan. Oleh karena itu, Informan tersebut di atas dipilih secara

sengaja dengan mempertimbangkan kriteria yang dijelaskan oleh Riduwan (Bungin, 2013: 54) bahwa informan merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian.

Data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Data ini biasanya didapat dari wawancara dan bersifat subjektif sebab data tersebut ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Kompasiana, 2011).

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu dan hal pendukung lainnya, baik melalui wawancara, dan dokumentasi dengan pengurus masjid, serta menggunakan kuesioner kepada pihak tertentu.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, literature dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Dalam tahap pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara dengan menggunakan kerangka berupa pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar. Informan yang akan diwawancarai adalah pengurus masjid dan bendahara masjid yang menguasai fakta penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada pihak tertentu, dimana peneliti menggunakan metode ini sebagai bahan penunjang dari wawancara.

3. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi dokumentasi dengan cara mencari data mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid berupa literatur dan laporan keuangan yang dikeluarkan masjid serta dokumen lainnya yang menjadi pendukung dalam penelitian yang diberikan oleh informan.

4. Studi Pustaka

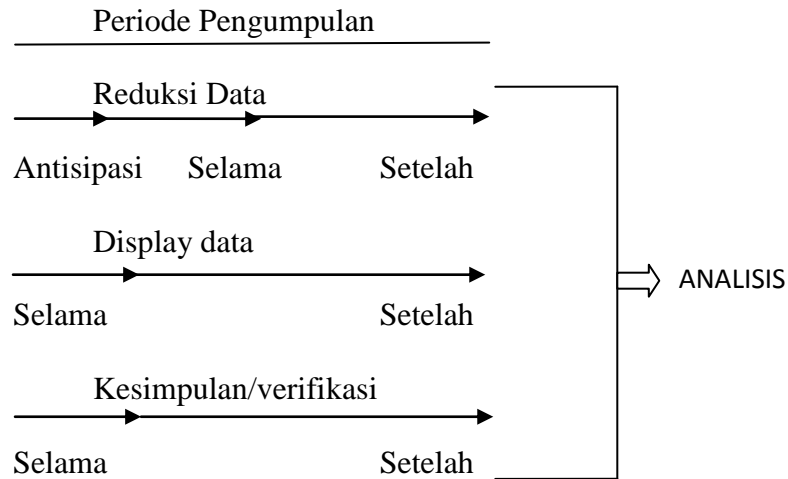
Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi pustaka dengan cara mencari data mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid berupa buku buku dan artikel ilmiah.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2009; 335-336), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Miles dan Huberman (2009; 337-338) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan lagi sampel tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

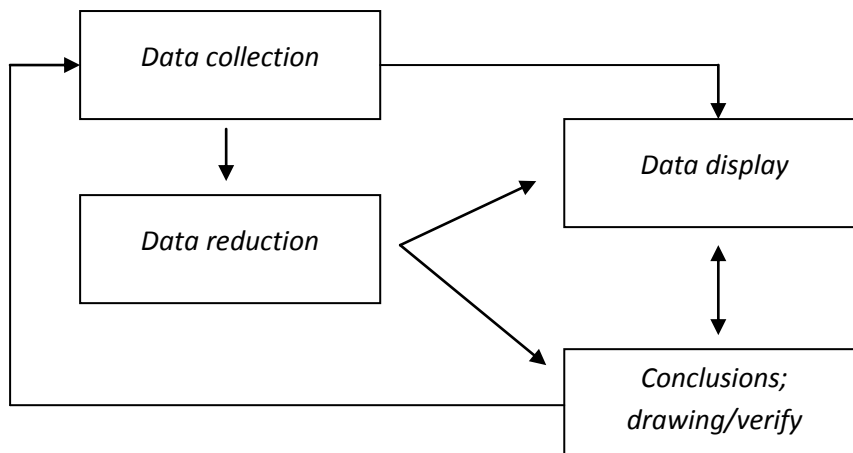
Selain itu, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 3.1
Komponen Dalam Analisis Data (*flow model*)

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipatori sebelum melakukan reduksi data. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa langkah-langkah analisis data antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan satu sama lain. Langkah-langkah tersebut tidak dapat dipisahkan atau pun kerjakan secara tidak urut. Agar dapat menghasilkan data yang baik maka penliti dalam menganalisis data harus sesuai dengan langkah-langkah yang ada.

Selanjutnya, model Interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.2
Komponen Dalam Analisis Data (*Interactive Model*)

Gambar diatas menunjukkan langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2009; 16-21), yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Merupakan sebagi suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data dsar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, sehingga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil wawancara, dokumntasi atau studi pustaka.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik,

pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami;

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion drawing/verifying*)

Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Sedangkan teknik analisis data kuesioner, penulis menggunakan rumus Dean J. Champion (1990:302). Untuk keperluan interpretasi hasil perhitungan persentase, Dean Champion mengemukakan sebagai berikut:

- a. 0% - 25% : berarti Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan masjid tidak baik
- b. 25% - 50% : berarti Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan masjid kurang baik.
- c. 50%- 75% : berarti Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan masjid cukup baik.
- d. 75% – 100% : berarti Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan masjid sangat baik.

Selanjutnya dalam menganalisis data menggunakan rumus Champion sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban "ya"}}{\sum \text{Jumlah Jawaban observasi}} \times 100\%$$

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dengan menggunakan analisis kualitatif model interaktif adalah sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara dan kuesioner dengan informan-informan berkaitan dengan pengelolaan keuangan masjid sesuai pedoman wawancara yang telah dibuat;
2. Membaca dan menjabarkan pernyataan dari informan, mencari definisi dan postulat yang cocok, dengan mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan konsep-konsep kunci yang telah ditetapkan baik berupa pernyataan, definisi, unsur-unsur dan sebagainya;
3. Mengkategorikan catatan-catatan yang diambil dari sumber data lalu mengklasifikasikannya ke dalam kategori yang sama;
4. Menelaah relevansi data dengan cara mengkaji susunan hasil penelitian yang sistematis sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, serta kesesuaian dengan PSAK 45;
5. Melengkapi data dengan cara mengkaji isi data baik berupa hasil wawancara, dan hasil dokumentasi serta hasil studi pustaka.
6. Menjadikan jawaban, maksudnya adalah hasil kajian data kemudian dijadikan jawaban setelah dianalisis

7. Menyusun laporan, setelah menjabarkan jawaban secara terperinci kemudian menyusunnya dalam bentuk laporan.